DISERTASI

MODEL EVALUASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM TATA KELOLA DANA BOS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Evaluation Model of the local government information system (SIPD) in management of bos funds of the education office of Berau District, East Kalimantan Province

Oleh :

DEWI SUGESTI

NBI : 1172300013

PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2026

DISERTASI

MODEL EVALUASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM TATA KELOLA DANA BOS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Evaluation Model of the local government information system (SIPD) in management of bos funds of the education office of Berau District, East Kalimantan Province

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akademik
dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Doktor Strata-3
Program Studi Doktor Ilmu Administrasi



Oleh :
DEWI SUGESTI
NBI : 1172300013

PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2026

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

PENULISAN DISERTASI INI TELAH DISAHKAN
PADA TANGGAL, 1 APRIL 2026
Oleh:

Promotor



Prof. Dr. V. Rudy Handoko, M.S.
NPP. 20110.86.0062

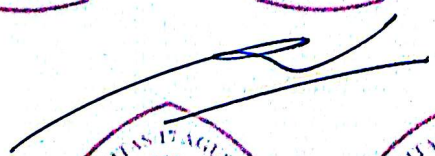
Co-Promotor



Prof. Dr. Teguh Priyo Sadono, Drs., M.Si.
NPP. 20150.19.0816

Progam Studi Doktor Ilmu Adminnistrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mengetahui/Mengesahkan,

Dekan	Kaprodi
	
Prof. Dr. V. Rudy Handoko, M.S.	Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS.
NPP. 20110.86.0062	NPP. 20120.90.0203

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA PENGUJI DISERTASI

Panitia Penguji

Supangat, M.Kom., Ph.D, ITIL., COBIT, CLA, CISA (.....)

Prof. Dr. V. Rudy Handoko, M.S. (.....)

Prof. Dr. Teguh Priyo Sadono, Drs., M.Si. (.....)

Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS. (.....)

Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P. (.....)

Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM (.....)

Prof. Dr. IB. Wirawan, SU (.....)

Dr. Sri Wahyuni, M.Si (.....)

Dr. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H (.....)

Prof. Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom., M.Kom (.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS.
NPP. 20120.90.0203

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Dewi Sugesti
NPM	: 1172300013
Program Studi	: Doktor Ilmu Administrasi
Judul Disertasi	: Model Evaluasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) Dalam tata kelola dana BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

Menyatakan bahwa :

1. Disertasi yang saya buat adalah benar hasil karya ilmiah saya sendiri dan atas bimbingan dari dosen pembimbing, bukan hasil plagiat dari karya ilmiah orang lain yang telah dipubikasikan dan/atau karya ilmiah orang lain yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik tertentu
2. Jika saya mengambil, mengutip atau menulis sebagian dari karya ilmiah orang lain, akan mencantumkan dalam daftar pustaka
3. Apabila di kemudian hari ternyata Disertasi saya terbukti sebagian dan/atau seluruhnya sebagai plagiat dari karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi terberat yaitu pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar.

Surabaya, 01 April 2026

Tertanda tangan



Dewi Sugesti

(1172300013)

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dewi Sugesti
NBI/ NPM	: 1172300013
Fakultas	: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Program Studi	: Doktor Ilmu Administrasi
Jenis Karya	: Disertasi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ***Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)***, atas karya saya yang berjudul:

"Model Evaluasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Tata Kelola Dana BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur"

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif** (***Nonexclusive Royalty - Free Right***), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 01 April 2026

Yang Menyatakan



Dewi Sugesti
1172300013

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Kabupaten Berau. Latar belakang penelitian ini adalah adanya tantangan dalam pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel, di mana SIPD diluncurkan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi. Namun, implementasinya di daerah menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menghambat optimalisasi anggaran pendidikan. Kesenjangan penelitian yang signifikan adalah tidak adanya studi yang secara spesifik mengevaluasi modul dana BOS dalam SIPD di tingkat dinas pendidikan menggunakan kerangka analisis yang holistic. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan model evaluasi CIPP *(Context, Input, Process, Product)*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber data. Hasil penelitian mengungkap sebuah paradoks: pengguna SIPD merasa akuntabilitas meningkat, namun temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menunjukkan bukti sebaliknya, seperti SPJ tidak lengkap dan potensi kelebihan bayar, yang mengindikasikan fenomena "garbage in, gospel out". Ditemukan dua akar masalah fundamental: pertama, konflik antara arsitektur SIPD yang kaku dan berbasis logika APBD dengan prinsip fleksibilitas Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dianut dana BOS. Kedua, kelemahan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang kritis, ditandai dengan pelatihan yang minim dan praktik berbahaya penguasa akun yang merusak kontrol internal. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan rancangan baru yang holistik, yaitu model teknis Jembatan Digital yang menghubungkan ARKAS dan SIPD melalui API untuk menjaga fleksibilitas sekolah, serta kerangka evaluasi baru CIPP-A+E (Adaptasi dan Ekosistem) untuk mengukur kapasitas evolusi sistem dan kesehatan interaksinya dengan regulasi eksternal.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, *Governance*, CIPP, SIPD, ARKAS, Dana BOS

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in the governance of School Operational Assistance (BOS) funds at the Berau Regency Education Office. The research is set against the backdrop of challenges in managing BOS funds with transparency and accountability, for which SIPD was launched as a solution to enhance efficiency. However, its implementation at the regional level faces various obstacles that potentially hinder the optimization of the education budget. A significant research gap exists, as no prior studies have specifically evaluated the BOS fund module within SIPD at the education office level using a holistic analytical framework. The research method employed is descriptive qualitative, utilizing the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation analysis. The validity of the data was verified using source triangulation. The findings reveal a significant paradox: while SIPD users perceive an increase in accountability, findings from the Supreme Audit Agency (BPK) Examination Report show contrary evidence, such as incomplete financial accountability reports (SPJ) and potential overpayments, indicating a "garbage in, gospel out" phenomenon. Two fundamental root problems were identified: first, a conflict between the rigid, regional budget (APBD)-based architecture of SIPD and the principle of flexibility inherent in School-Based Management (SBM) that governs BOS funds. Second, critical weaknesses in human resource capacity, characterized by minimal training and the hazardous practice of a single individual holding multiple account authorities, which undermines internal controls. As a solution, this study formulates a new holistic design: a "Digital Bridge" technical model that connects ARKAS and SIPD via an API to preserve school-level flexibility, and a novel CIPP-A+E (Adaptation and Ecosystem) evaluation framework designed to measure the system's evolutionary capacity and the health of its interaction with external regulations.

Keyword : Policy Evaluation, Governance, CIPP, SIPD, ARKAS, BOS Funds

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul **"Model Evaluasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Tata Kelola Dana BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur"**. Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Administrasi pada Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan disertasi ini tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Namun, berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Harjo Seputro, ST., MT selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta seluruh jajaran civitas akademika yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus Merah Putih ini.
2. Bapak Prof. Dr. V. Rudy Handoko, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus bertindak sebagai Promotor. Terima kasih yang mendalam atas segala ilmu, bimbingan, kesabaran, dan arahan strategis yang diberikan kepada penulis mulai dari awal penyusunan proposal hingga selesainya disertasi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Teguh Priyo Sadono, Drs., M.Si., selaku Co-Promotor, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan masukan kritis, koreksi yang membangun, serta motivasi kepada penulis selama proses penelitian berlangsung.
4. Bapak Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, atas fasilitas, dukungan akademik, dan kelancaran administrasi yang diberikan selama penulis menempuh studi.
5. Bupati Berau, Ibu Hj. Sri Juniarsih MAS, M.Pd., beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Berau yang telah memberikan izin penelitian dan dukungan data yang diperlukan dalam studi ini.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau beserta seluruh staf, Tim Manajer BOS, dan Operator yang telah bersikap kooperatif dan terbuka dalam memberikan informasi serta data terkait implementasi SIPD dan tata kelola dana BOS.

7. Para Kepala Sekolah dan Bendahara Dana BOS di lingkungan Kabupaten Berau yang telah bersedia menjadi informan, meluangkan waktu untuk diwawancarai, dan memberikan gambaran riil mengenai kondisi di lapangan.
8. Keluarga tercinta, suami penulis Dr. H. Jamhari, S.Pd., M.A.P, serta anak-anak terkasih Ananda Zalfa' Nadhifah Jamhari, Zayan Mahib Jamhari, dan Habib Zavair Jamhari. Terima kasih atas doa tulus, kasih sayang, kesabaran, serta dukungan moril maupun materil tak terhingga yang senantiasa diberikan. Keberhasilan ini saya persembahkan untuk kalian.
9. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Angkatan DIA57 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atas kebersamaan, diskusi, dan saling menyemangati dalam menyelesaikan studi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu administrasi publik, serta memberikan manfaat praktis bagi Pemerintah Kabupaten Berau dalam optimalisasi tata kelola dana pendidikan.

Surabaya, Februari 2026

Penulis,

Dewi Sugesti

NIM 1172300013

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR i
SAMPUL DALAM ii
LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA PENGUJI DISERTASI iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH v
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
DAFTAR SINGKATAN xiv
DAFTAR GLOSSARY xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 13
1.3 Tujuan Penelitian 13
1.4 Manfaat Penelitian 14
1.4.1 Manfaat Teoritis 14
1.4.2 Manfaat Praktis 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15
2.1 Penelitian Terdahulu 15
2.2 Landasan Teori 43
2.2.1 Kebijakan Publik 43
2.2.2 Evaluasi Kebijakan 48
2.2.3 Model Evaluasi Kebijakan Publik 52
2.2.3 Good Governance (Tata Kelola) 55
2.2.4 Sistem Informasi Pemerintah Daerah 58
2.2.5 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 60
2.3 Critical Review 62
2.4 Kerangka Penelitian 66
BAB III METODE PENELITIAN 71
3.1 Landasan Filosofis 71
3.2 Jenis Penelitian 72

3.3 Fokus Penelitian 74
3.4 Lokus Penelitian 75
3.5 Sumber Data 76
3.6 Teknik Pengumpulan Data 81
3.7 Teknik Keabsahan Data 82
3.8 Teknik Analisis Data 84
BAB IV DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 87
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Berau 87
4.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Berau 88
4.3 Gambaran Umum Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Berau 93
4.4 Peran Dinas Pendidikan dalam Tata Kelola Dana BOS 97
BAB V EVALUASI SIPD DALAM TATA KELOLA DANA BOS 101
5.1 Evaluasi Kontek 102
5.2 Evaluasi Input 117
5.3 Evaluasi Process 131
5.4 Evaluasi Product 144
BAB VI FAKTOR PENGHAMBAT EVALUASI SIPD 163
BAB VII RANCANGAN MODEL SIPD DALAM TATA KELOLA DANA BOS 169
7.1 Kondisi existing pengelolaan dana BOS dengan program SIPD di Dinas Pendidikan Kabupaten Berau 169
7.2 Rancangan model evaluasi SIPD dalam tata kelola dana BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Berau di Kabupaten Berau 176
BAB VIII TEMUAN PENTING, IMPLIKASI DAN PROPOSISI 191
8.1 Temuan Penting 191
8.2 Implikasi Penelitian 192
8.3 Proposisi 199
BAB IX PENUTUP 201
9.1 Kesimpulan 201
9.2 Rekomendasi 202
DAFTAR PUSTAKA 205
LAMPIRAN 217

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 18
Tabel 4.1 Layanan Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Berau 101
Tabel 4.2 Peraturan Kunci Pengelolaan Dana BOS (Nasional dan Daerah) 109
Tabel 5.1 Perbandingan Kondisi Tata Kelola Keuangan Sebelum & Setelah SIPD 118
Tabel 5.2 Elaborasi kondisi pra-SIPD, kebutuhan yang mendorong perubahan, dan implementasi SIPD 128
Tabel 5.3 Ringkasan Temuan Pemeriksaan Inspektorat 146
Tabel 5.4 Temuan wawancara dengan data faktual dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat 161
Tabel 5.6 Perbandingan hasil wawancara dengan data LHP BPK 179
Tabel 5.6 Temuan penting evaluasi CIPP 183
Tabel 6.1 Kesenjangan anatara hasil wawancara dengan Temuan LHP Inspektorat & BPK 192
Tabel 7.1 Perbedaan fundamental kondisi sebelumSIPD dan setelah SIPD 198
Tabel 7.2 Perbandingan Model CIPP dengan CIPP-A+E 216

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....220
Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (*interactive model*) 222
Gambar 7.1 Model *existing* pengelolaan dana BOS dalam ekosistem SIPD 229
Gambar 7.2 Rancangan model jembatan digital Pengelolaan Dana BOS dalam ekosistem SIPD 230
Gambar 7.3 Rancangan Model CIPP-A+E.....242

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman wawancara 217
Lampiran II Dokumentasi wawancara 221
Lampiran III Temuan pemeriksaan BPK terkait BOSNAS di Dinas Pendidikan Kabupaten Berau 226
Lampiran IV Laporan SP2B SDN 002 Merapun 233
Lampiran V Laporan SP2B SMPN 1 Tanjung Redeb 245
Lampiran VI Turnitin 257

DAFTAR SINGKATAN

AKLAP	Akuntansi dan Pelaporan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	Aparatur Sipil Negara
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BOSDA	Bantuan Operasional Sekolah Daerah
BOSNAS	Bantuan Operasional Sekolah Nasional
BOSP	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
CIPP	*Context, Input, Process, Product*
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKD	Laporan Keuangan Daerah
LKP	Lembaga Kursus dan Pelatihan
LPPD	Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
MARKAS	Manajemen ARKAS
MBS	Manajemen Berbasis Sekolah
PA	Pengguna Anggaran
PERDA	Peraturan Daerah
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PTK	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
RKAS	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
SD	Sekolah Dasar
SDLB	Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	Sumber Daya Manusia
SEB	Surat Edaran Bersama
Sidiknas	Sistem Pendidikan Nasional
SIMDA	Sistem Informasi Manajemen Daerah
SIPD	Sistem Informasi Pemerintah Daerah
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPJ	Surat Pertanggungjawaban
SPP	Sumbangan Pembinaan Pendidikan
SSH	Standar Satuan Harga
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

DAFTAR GLOSSARY

Akuntabilitas	Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam konteks SIPD, ini merujuk pada kemampuan sistem untuk memastikan setiap transaksi dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara digital.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah. Logika dan siklus APBD menjadi arsitektur dasar dari sistem SIPD.
Application Programming Interface (API)	Antarmuka komputasi yang mendefinisikan interaksi antara beberapa perantara perangkat lunak. Dalam konteks disertasi ini, merujuk pada "jembatan digital" yang memungkinkan sistem ARKAS dan SIPD berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis tanpa memerlukan input manual ganda.
ARKAS/MARKAS	Serangkaian aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan dana BOS. ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) digunakan di tingkat sekolah untuk perencanaan berbasis kebutuhan, sementara MARKAS (Manajemen ARKAS) digunakan oleh dinas pendidikan untuk mengelola dan memverifikasi data agregat dari seluruh sekolah di wilayahnya.
Audit Berbasis Risiko	Pendekatan audit modern di mana auditor memfokuskan sumber daya dan perhatiannya pada area atau transaksi yang memiliki potensi risiko kesalahan, penyelewengan, atau ketidakpatuhan yang paling tinggi, daripada memeriksa semua transaksi secara acak.
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Dana ini dirancang untuk bersifat fleksibel dan otonom di tingkat sekolah.
Desentralisasi	Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit di tingkat bawah. Semangat dana BOS berakar pada prinsip desentralisasi pendidikan untuk memberdayakan sekolah.
Efektivitas	Ukuran tingkat keberhasilan suatu program atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efisiensi	Ukuran perbandingan antara output (hasil) yang dicapai dengan input (sumber daya) yang digunakan. Sistem yang efisien mampu mencapai hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya minimal.
Evaluasi Kebijakan	Suatu proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik berhasil mencapai tujuannya, mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari implementasinya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.
Garbage In, Gospel Out	Sebuah istilah dalam ilmu komputer yang berarti kualitas output ditentukan oleh kualitas input. Dalam disertasi ini, ini merujuk pada risiko fatal di mana data sumber yang buruk atau tidak valid dari sekolah (Garbage In) diolah oleh sistem SIPD menjadi laporan akhir yang terlihat rapi dan meyakinkan (Gospel Out), sehingga menciptakan ilusi akuntabilitas dan menutupi masalah yang sebenarnya.
Interoperabilitas	Kemampuan sistem atau organisasi yang berbeda untuk bekerja sama dan bertukar informasi secara mulus. Dalam konteks penelitian, ini merujuk pada tantangan untuk membuat sistem SIPD (Kemendagri) dan ARKAS (Kemendikbudristek) dapat berinteraksi secara efektif.
Jembatan Digital	Konsep model yang diusulkan dalam disertasi ini untuk menghubungkan sistem ARKAS dan SIPD secara cerdas dan otomatis melalui API. Ini berfungsi sebagai *middleware* cerdas yang menyelesaikan konflik filosofi antara fleksibilitas yang dibutuhkan sekolah (di ARKAS) dengan standardisasi yang dituntut oleh pemerintah pusat (di SIPD).
Kebijakan Publik	Serangkaian tindakan atau pilihan yang diambil (atau tidak diambil) oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah publik. Implementasi SIPD merupakan sebuah kebijakan publik di bidang transformasi digital tata kelola keuangan.
Kesenjangan Digital (Digital Divide)	Kesenjangan akses, penggunaan, atau dampak teknologi informasi dan komunikasi antara individu, rumah tangga, atau wilayah geografis yang berbeda. Dalam penelitian ini, merujuk pada perbedaan infrastruktur internet antara sekolah di perkotaan dan di daerah terpencil.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan

	tanggung jawab penggunaan anggaran. Dalam konteks sekolah, Kepala Sekolah bertindak sebagai KPA untuk dana BOS.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk mengambil keputusan secara mandiri guna meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan. Ini adalah filosofi yang mendasari fleksibilitas dana BOS.
Middleware	Perangkat lunak yang bertindak sebagai jembatan antara dua aplikasi atau sistem yang berbeda, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi. Model Jembatan Digital yang diusulkan berfungsi sebagai middleware antara ARKAS dan SIPD.
Model CIPP	Sebuah kerangka evaluasi program yang komprehensif, mencakup empat aspek: Konteks *(Context),* Masukan *(Input),* Proses *(Process),* dan Produk/Hasil *(Product).* Model ini terbukti memiliki keterbatasan dalam mengevaluasi program digital yang kompleks.
Model CIPP-A+E	Model evaluasi baru yang diusulkan dalam disertasi ini sebagai penyempurnaan dari model CIPP. Model ini menambahkan dua dimensi transversal: Adaptasi (A) dan Ekosistem (E). Dimensi Adaptasi (A) secara khusus mengevaluasi kapasitas belajar organisasi dan mekanisme umpan balik, sementara dimensi Ekosistem (E) menilai kesehatan interaksi program dengan sistem dan regulasi eksternal lainnya.
Otonomi Sekolah	Kewenangan dan kemandirian yang dimiliki oleh sekolah dalam mengelola urusannya sendiri, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pendidikan serta pengelolaan sumber daya.
Paradoks Keberhasilan	Temuan penting dalam penelitian ini yang menggambarkan situasi di mana SIPD dinilai berhasil secara prosedural di tingkat makro (laporan terkonsolidasi, transparansi formal), namun gagal secara substantif di tingkat operasional (munculnya inefisiensi baru dan lemahnya akuntabilitas praktik).
Pemisahan Tugas (Segregation of Duties)	Prinsip kontrol internal dasar yang bertujuan untuk mencegah fraud dan kesalahan dengan cara memastikan bahwa tidak

	ada satu individu pun yang memiliki kendali atas semua aspek dari setiap transaksi keuangan.
Penguasa Akun	Istilah yang digunakan dalam temuan penelitian untuk menggambarkan praktik berisiko di mana satu individu memegang dan menjalankan beberapa akun dengan peran dan wewenang yang berbeda (misalnya, akun Bendahara dan Kepala Sekolah). Praktik ini secara langsung melumpuhkan mekanisme *check and balance* dalam sistem dan menjadi akar dari kegagalan prinsip pemisahan tugas.
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh sekolah untuk satu tahun ajaran, yang berisi rincian program, kegiatan, dan alokasi dana yang akan digunakan, termasuk dari dana BOS.
Satu Data Indonesia	Kebijakan pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah. SIPD merupakan instrumen untuk mewujudkan Satu Data di bidang keuangan daerah.
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah secara nasional dalam satu platform, didasarkan pada amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.
SPJ Fiktif	Surat Pertanggungjawaban yang dibuat untuk kegiatan atau pembelian yang sebenarnya tidak pernah terjadi, dengan tujuan untuk menyalahgunakan anggaran.
Standar Satuan Harga (SSH)	Standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai acuan tertinggi dalam perencanaan dan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBD. Dalam praktiknya, SSH menjadi penghambat fleksibilitas pengelolaan dana BOS.
Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	Dokumen laporan yang dibuat sebagai bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telah diterima dan dibelanjakan, yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah seperti kuitansi, nota, dan dokumentasi lainnya.
Transparansi	Prinsip keterbukaan yang memungkinkan pihak-pihak yang

	berkepentingan untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai kebijakan dan proses pengelolaan sumber daya publik. SIPD meningkatkan transparansi prosedural namun belum tentu transparansi substantif.
Validasi	Proses untuk memastikan bahwa data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem adalah benar, logis, dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam konteks SIPD, validasi dilakukan oleh tim dinas terhadap RKAS sekolah.
Verifikasi	Proses pemeriksaan atau konfirmasi untuk memastikan kebenaran, keakuratan, atau keaslian sesuatu. Dalam pengelolaan dana BOS, verifikasi dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pendukungnya.
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini audit tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pencapaian WTP seringkali dijadikan indikator keberhasilan formal implementasi sistem keuangan.